

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG MUSLIM
TERHADAP KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM
JUAL BELI (STUDI DI PASAR GROSIR CIPULIR
JAKARTA SELATAN)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MULYADI. I
99383495**

**PEMBIMBING
1. DRS. M. SODIK, S.SOS, M.SI.
2. GUSNAM HARIS, S.AG, M. AG**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Mulyadi. I

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mulyadi. I

N.I.M. : 99383495

Judul : "Kesadaran Hukum Pedagang Muslim terhadap Ketentuan

Hukum Islam dalam Jual Beli (Studi di Pasar Grosir Cipulir

Jakarta Selatan)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1427 H

13 Februari 2006 M

Pembimbing I



Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si

NIP : 150275040

Drs. Gusnam Haris, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Mulyadi. I

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mulyadi. I

N.I.M. : 99383495

Judul : "Kesadaran Hukum Pedagang Muslim terhadap Ketentuan
Hukum Islam dalam Jual Beli (Studi di Pasar Grosir Cipulir
Jakarta Selatan)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Muharram 1427 H
15 Februari 2006 M

Pembimbing II


Drs. Gusnam Haris, M.Ag.
NIP : 150289263

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

KESADARAN HUKUM PEDAGANG MUSLIM TERHADAP
KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI
(STUDI DI PASAR GROSIR CIPULIR JAKARTA SELATAN)

Yang disusun oleh:

Mulyadi. I
NIM : 99383495

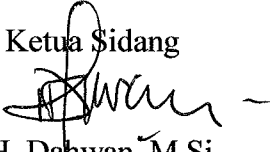
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2006 M/11 Shafar 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Shafar 1427 H
20 Maret 2006 M

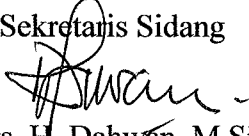


Panitia Ujian Munaqasyah:

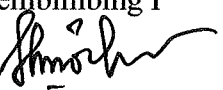
Ketua Sidang


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP : 150178662

Sekretaris Sidang


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP : 150178662

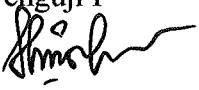
Pembimbing I


Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP : 150275040

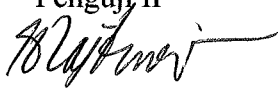
Pembimbing II


Drs. Gusnam Haris, M.Ag.
NIP : 150289213

Penguji I


Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP : 150275040

Penguji II


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP : 150275462

ABSTRAK

KESADARAN HUKUM PEDAGANG MUSLIM TERHADAP KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI (STUDI DI PASAR GROSIR CIPULIR JAKARTA SELATAN)

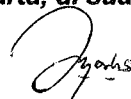
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan 1) tingkat kesadaran para pedagang di pasar Cipulir menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli 2) hubungan tingkat pendidikan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli 3) hubungan pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli 4) hubungan tingkat pendidikan dan pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli secara bersamaan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan bersifat *ex post facto*, menggunakan metode pendekatan kuantitatif statistik dan sosiologis untuk menelaah efektifitas hukum Islam di dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di pasar grosir Cipulir, jalan Cileduk Raya, Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2005-Desember 2005. Jumlah seluruh populasi pedagang adalah 2000 orang yang terdiri dari pedagang tetap dan setengahnya pedagang musiman, dari jumlah tersebut diambil 60 orang sebagai responden secara acak dengan karakteristik berstrata (SD, SMP, SMU/SMK, PT). Ubahan terikat dalam penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pedagang Menerapkan Hukum Islam dalam Jual Beli (Y), ubahan-ubahan bebasnya adalah Tingkat Pendidikan (X1) dan Pemahaman Agama tentang Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli (X2). Uji validitas dan reliabilitas menggunakan korelasi *product moment* dan *alfa cronbach*. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah korelasi produk moment dan analisis regresi

Tingkat kesadaran para pedagang pasar grosir Cipulir menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli cukup tinggi (distribusi kategorisasi 78,3%). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli. Koefisien korelasi sebesar $(r_{x1y}) = 0,151$ dengan nilai p sebesar 0,248 ($p \text{ batas} = 0,05$), jika $p < 0,05$ terdapat korelasi yang signifikan. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli. Koefisien korelasi sebesar $(r_{x2y}) = 0,292$ dengan nilai p sebesar 0,022 ($p \text{ batas} = 0,05$), korelasi signifikan jika $p < 0,05$. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan pedagang, pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli secara bersamaan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli. Koefisien korelasi ganda sebesar $R_{yx (1,2,3)} = 0,316$ dengan nilai p sebesar 0,049. Pengujian keberartian R ganda dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan, F hitung sebesar 3,161 dengan signifikansi 0,049. Berdasarkan pada koefisien prediktor tersebut didapatkan persamaan garis regresi $Y = 37,83 + 0,707 X_1 + 0,316 X_2$.

MOTTO

**Seperti waktu walaupun tertatih teruslah berjalan...
(Penyusun)**

Yogyakarta, di suatu pagi....

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mulyadi. I'.

Mulyadi. I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang cinta dan kasih sayangnya tak pernah kenal lelah..
2. Adik-adikku yang baik dan membanggakan (Des, Junis, Ricky, Nel)
3. Seorang yang selalu memberikan semangat dan berkata "kerjakanlah walau satu baris..!" terima kasih Husna....!
4. Kakak-kakak sepupuku Riyandhi Abnur, M. Ali, Ajo Rami, Jo Gadang, Angah, Bang Kodir insya Allah jasa kalian tak akan kulupakan...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	h
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta' Marbūtah diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fītrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

V. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

VI. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	'a antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawl al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهدان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين،
امابعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya penyusun tidak akan mampu mengerjakan tugas ini. Shalawat dan salam tidak lupa penyusun haturkan kepada kekasih Allah tercinta Nabi Muhammad SAW.

Setelah sekian lama akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Beban berat yang dulu penyusun rasakan, kini menjadi kebahagiaan tersendiri dan semuanya tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas ini. Karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

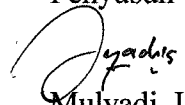
1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si, yang selalu dengan sikap terbuka dan hangat membimbing, mengarahkan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Drs. Gusnam Haris, M.Ag, yang dengan sabar memberikan penyusun masukan dan pencerahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya selama penyusun belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ir. H. Nanang, M.MA. beserta staf atas izin dan bantuannya.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa (BAKESBANG) propinsi DKI Jakarta, Bapak Drs. Wawan Gunawan beserta staf atas izin dan bantuannya.
8. Kepala Biro Administrasi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Drs. H. Agus Salim Utud, M.Si beserta staf atas izin dan bantuannya.
9. Kepala Dinas pasar grosir Cipulir, Bapak Bastian Siregar, SH, MM. beserta staf atas bantuannya selama penyusun melakukan penelitian.
10. Kakak sepupuku Riyandhi Abnur, M. Ali, Romyco dan lain-lain yang selalu memberikan bantuan secara materil kepada penyusun dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapatkan ampunan, rahmat, hidayah dan maunah-Nya, amin. Dan akhirnya tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Yogyakarta, 20. Januari. 2006 M
20 Dzulhijjah. 1426 H

Penyusun


Mulyadi. I
99383495

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
1. Tingkat Pendidikan.....	8
2. Kesadaran Hukum	13

F. Hipotesis	20
G. Variabel-Variabel Pokok.....	20
H. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Populasi dan Sampel	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Instrumen Penelitian	25
6. Uji Coba Instrumen	27
7. Metode Pendekatan Penelitian.....	31
8. Teknik Analisis Data.....	31
I. Sistematika Pembahasan.....	37
 BAB II. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI	39
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	39
1. Pengertian Jual Beli.....	39
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	41
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	42
1. Rukun Jual Beli	42
2. Syarat Jual Beli.....	42
C. Macam-macam Jual Beli	48
1. Jual Beli Ditinjau dari Segi Pelaksanaannya	48
2. Jual Beli Ditinjau dari Sudut Pembayaran.....	51

D. Hal-hal yang Membatalkan Jual Beli	53
E. Ketentuan-ketentuan Aqad.....	55
1. Fungsi dan Kedudukan Aqad	55
2. Berakhirnya Aqad.....	56
F. Moral dan Etika Perdagangan dalam Jual Beli	57
1. Moral Perdagangan dalam Jual Beli.....	57
2. Etika Perdagangan dalam Jual Beli	58
3. Etika Memperoleh Keuntungan dalam Dagang.....	59
4. Cara Penentuan Harga	61

BAB III. KEADAAN UMUM PASAR GROSIR CIPULIR DAN PRAKTEK

JUAL BELI GROSIR	62
A. Lintasan Sejarah dan Perkembangannya	62
B. Struktur Organisasi Pasar Cipulir	64
C. Sarana dan Prasarana Perdagangan di Pasar Cipulir	66
D. Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Cipulir	66

BAB IV. ANALISIS

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Grosir Cipulir	75
1. Praktek Jual Beli Grosir Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli.....	75
2. Praktek Jual Beli Grosir Ditinjau dari	

Macam-Macam Jual Beli.....	84
3. Jual Beli Grosir Ditinjau dari Konteks <i>Urf</i> dan <i>Maslahah</i>	88
B. Analisis Data	90
1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	90
2. Statistik Deskriptif.....	94
3. Pembuktian Hipotesis.....	101
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-saran	114
C. Keterbatasan Penelitian	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Kisi-kisi Instrumen Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Ketentuan Hukum Islam	26
Tabel 2.1. Kisi-kisi Instrumen Kesadaran terhadap Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli	26
Tabel 3.1. Interpretasi Nilai Korelasi.....	31
Tabel 1.3. Data Tempat Jualan Tahun 2005.....	63
Tabel 2.3. Pengelompokan Kegiatan Pedagang Pakaian Jadi Pasar Cipulir Jakarta Selatan.....	68
Tabel 1.4. Hasil Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Islam	91
Tabel 2.4. Hasil Validitas Kesadaran Hukum Islam	92
Tabel 3.4. Hasil Pengujian Reliabilitas	93
Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Skor Pendidikan Pedagang	95
Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi Skor Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Islam	96
Tabel 6.4. Distribusi Frekuensi Skor Kesadaran akan Ketentuan Hukum Islam.....	97
Tabel 7.4. Hasil Kategorisasi Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Islam	98
Tabel 8.4. Hasil Kategorisasi Kesadaran akan Ketentuan Hukum Islam	100
Tabel 9.4. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Sebaran	103
Tabel 10.4. Hasil Analisis Uji Linearitas	103

Tabel 11.4. Rangkuman Uji Multikolinearitas.....	105
Tabel 12.4. Hasil Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Paradigma Penelitian	21
Gambar 1.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Cipulir.....	65
Gambar 1.4. Diagram Batang Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Islam....	99
Gamabr 2.4. Diagram Batang Kesadaran terhadap Ketentuan Hukum Islam ..	101

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Terjemahan dan Biografi Ulama	121
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	125
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian.....	130
Lampiran 4. Uji Validitas	136
Lampiran 5. Uji Reliabilitas	140
Lampiran 6. Statistik Deskriptif	142
Lampiran 7. Kategori Data	146
Lampiran 8. Uji Normalitas.....	149
Lampiran 9. Uji Linieritas	153
Lampiran 10. Uji Multikolinieritas	155
Lampiran 11. Analisis Regresi	157
Lampiran 12. Curriculum Vitae	161

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai suatu masalah manusiawi merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh umat dimanapun dan dalam waktu kapanpun juga. Hal itu terlihat dari bagaimana hukum merupakan suatu faktor yang memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Di Indonesia selain hukum positif dan hukum adat, hukum Islam juga memiliki pengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'amalat*.¹ Dalam agama Islam selain ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan, ajaran muamalah untuk mengatur hubungan sesama manusia tidak kalah pentingnya. Ukuran keimanan seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya belaka, tetapi soal muamalah, sosial ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran bagi keimanan seseorang.²

Ajaran Islam telah mendorong umatnya untuk selalu berupaya maksimal dalam usaha ataupun bekerja di setiap lapangan kehidupan, sebagaimana firman Allah:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

² Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 15.

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله
كثيرا لعلكم تفلحون³

Salah satu bentuk usaha yang dianjurkan adalah bidang perdagangan. Tentunya dalam bidang perdagangan yang termasuk di dalamnya jual beli, harus dilakukan sesuai dengan kaidah hukum jual beli menurut Islam.

Salah satu pusat tempat aktivitas ekonomi dalam perdagangan (jual beli) adalah pasar. Pasar sebagai tempat bertemunya pedagang dengan pembeli dan tempat terjadinya proses pertukaran aktivitas produksi dan konsumsi telah berkembang menjadi satu kesatuan yang kompleks.

Awal munculnya pasar secara kultural dalam panggung sejarah agaknya sulit untuk mengungkapkannya. Hanya saja menurut Komaruddin timbulnya pasar diawali tambahan dan kekurangan barang.⁴ Dalam hal ini dia memberikan contoh konkrit bahwa petani atau pedagang akan membawa hasil panennya ke pasar apabila terdapat surplus tambahan komoditi atas kebutuhan sehari-hari mereka. Monzer Kafh menggambarkan sebuah pasar itu terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah tidak tertentu.⁵

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasar atau *market* adalah sebuah istilah yang ditujukan untuk suatu aktivitas ekonomi dan di dalamnya terjadi interaksi ekonomi yang melibatkan pembeli di satu sisi dan

³ Al-Jumuah (62) : 10.

⁴ Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 20.

⁵ Monzer Kafh, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machmud Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 49.

penjual di sisi lain, kemudian ada harga sebagai ukuran nilai suatu dan adanya sesuatu yang berbentuk benda maupun jasa sebagai obyek interaksi tersebut.

Pasar Cipulir yang berada di daerah Jakarta Selatan, merupakan sebuah pasar yang perkembangannya cukup pesat. Hal itu terlihat dari terus bertambahnya bangunan dan jumlah pedagang di pasar tersebut. Pada tahun 2004 jumlah kios dan counter di pasar tersebut telah ada \pm 1934 petak, yang terdiri dari empat lantai, belum lagi ditambah dengan bangunan baru yang sedang dalam tahap penyelesaian.⁶ Pasar ini merupakan pusat grosir pakaian jadi terbesar nomor tiga setelah pasar Tanah Abang dan Jatinegara di daerah khusus ibukota Jakarta. Dengan menyediakan berbagai produk dan desain pakaian mulai dari pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa, serta berbagai jenis bahan mulai dari jeans, katun sampai kaos, pasar ini memiliki tingkat dinamika dan nilai transaksi yang cukup tinggi.

Sebagai pasar yang besar, pedagang di pasar inipun terdiri dari berbagai macam etnis, di antaranya: Minang, Betawi, Sunda, Jawa dan etnis Tionghoa yang belakangan ini mulai turut berdagang juga di sana. Dari sekian banyak pedagang yang ada, mayoritas beragama Islam dengan tingkat kereligiusan yang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari indikasi banyaknya kajian-kajian ke-Islaman yang diadakan serta gelar “haji” yang banyak disandang oleh para pedagang.⁷

Tingkat pendidikan pedagang di pasar ini beragam, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Begitu juga pemahaman dan pengetahuan mereka

⁶ Observasi pada Tanggal 23-27 Desember 2004.

⁷ *Ibid.*

mengenai hukum Islam khususnya dalam aturan jual beli sehingga perilaku perdagangan mereka bermacam-macam, ada yang menerapkan hukum Islam dan ada yang tidak menerapkannya.

Keragaman pola dagang dan berbagai faktor yang melatar-belakangi baik internal maupun eksternal menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang serta kejujuran tentang kualitas barang dan lain-lain. Contoh kasus, ada pedagang yang dalam menawarkan barang dagangan memberikan contoh barang (sampel) yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya sehingga setelah konsumen menyetujui untuk dikirim ternyata tidak sesuai dengan kualitas barang yang disepakati, hal ini jelas sangat merugikan konsumen.⁸ Ini terjadi karena sistem grosir yang diterapkan di pasar tersebut yaitu hanya menawarkan barang dalam bentuk contoh (sampel).

Berangkat dari kasus serta keberagaman faktor-faktor yang melatar belakangi pedagang tersebut, timbul suatu pertanyaan dan keinginan penyusun untuk meneliti lebih lanjut tentang sejauhmana kontribusi tingkat pendidikan dan pemahaman agama tentang aturan hukum Islam dalam jual beli berpengaruh terhadap kesadaran pedagang di pasar tersebut dalam menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek perdagangan mereka dan dengan indikator tersebut dapat juga diketahui sejauhmana tingkat kesadaran pedagang di pasar tersebut dalam menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli.

⁸ Wawancara dalam observasi dengan M. Ali (salah seorang pedagang), 9 Januari 2005.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran para pedagang pasar Cipulir dalam menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli?
2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli?
3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli?
4. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam secara bersamaan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sejauhmana tingkat kesadaran para pedagang di pasar Cipulir dalam penerapan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli.
2. Untuk menjelaskan sejauhmana hubungan tingkat pendidikan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli

3. Untuk menjelaskan sejauhmana hubungan pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli
4. Untuk menjelaskan sejauhmana hubungan tingkat pendidikan dan pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli secara bersamaan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli.

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain:

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai aturan-aturan atau ketentuan perdagangan yang dilandasi syari'at Islam.
2. Sebagai masukan bagi para pedagang di pasar Cipulir, khususnya yang muslim akan pentingnya pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan, khususnya perdagangan.
3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian evaluasi dan diskusi secara ilmiah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah, tentang sejauhmana efektivitas hukum Islam (Muamalah) di lapangan riil dalam fungsinya sebagai penuntun bagi masyarakat muslim.

D. Telaah Pustaka

Norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat, oleh karena dasar dari suatu undang-undang atau aturan-aturan hukum adalah asumsi bahwa ada hubungan antara berbagai pola perilaku yang menjelma ke dalam bentuk hukum dengan perilaku nyata dari individu.⁹

Dalam pandangan Islam, hukum Allah merupakan ilmu pengetahuan pokok dan sarana paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dan kehidupan umat Islam.¹⁰

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹¹

Selain karya tersebut di atas, beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesadaran dalam pelaksanaan hukum Islam yang tertulis dalam bentuk skripsi antara lain: oleh Taqwin (jurusan jinayat)¹², skripsi ini membahas tingkat pengetahuan pemahaman umat Islam di tempat tersebut tentang hukum perwakafan tanah milik yakni perilaku wakif, pejabat yang bersangkutan.

⁹ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 85.

¹⁰ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Hussein, Cet I (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 20.

¹¹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 53.

¹² Taqwin, *Kesadaran Hukum Umat Islam terhadap Pelaksanaan Pewakafan Tanah Milik (Studi Kasus terhadap Kabupaten Boyolali)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

Selanjutnya penelitian oleh Sri Hartatik (Jurusan Muamalah)¹³, yang membahas tingkat pengetahuan atau pemahaman pedagang di tempat tersebut dalam pelaksanaan hukum Islam dalam jual beli.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap kedua judul skripsi di atas, maka dapat diketahui bahwa skripsi yang penyusun angkat tidak sama dengan kedua skripsi tersebut. Skripsi karya Taqwim mengangkat permasalahan yang berbeda yaitu pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang hukum zakat sedangkan skripsi Sri Hartatik mengangkat masalah tentang pengetahuan, pemahaman pedagang tentang ketentuan jual beli namun tidak mengkaji tentang hubungan tingkat pendidikan dan pemahaman keagamaan tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli dengan kesadaran pedagang tersebut menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli.

E. Kerangka Teoretik

1. Tingkat Pendidikan

Untuk menjadikan terbentuknya perilaku tiap-tiap individu dengan adanya aspek kognitif atau pengetahuan obyek kepada para pedagang muslim tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perdagangan, kemudian pengetahuan itu diinternalisasikan dalam dirinya sehingga mempengaruhi tingkah laku mereka dalam dalam praktek berdagang mereka, hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan tiap-tiap individu seperti tingkat pendidikan dan pemahaman mereka terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan

¹³ Sri Hartatik, *Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli Di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

perdagangan tersebut. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.¹⁴

Menurut Kamus Besar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa “Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan dan cara mendidik”.¹⁵

Sebagai suatu proses pembentukan pribadi pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik.¹⁶

Dari beberapa pengertian tentang pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada dasarnya mempunyai pengertian proses penyiapan dan pengembangan seseorang melalui kegiatan belajar dan pengajaran yang sudah dipersiapkan untuk peranannya di masa yang akan datang. Dengan adanya pendidikan, diharapkan seseorang akan mampu berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Melalui pendidikan

¹⁴ *Undang-undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003), hlm. 5.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 141.

¹⁶ Umar Tirtarahardja, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 34.

diharapkan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian yang matang sehingga akan mampu bersikap dan bertindak laku sesuai dengan aturan.

Pendidikan yang ada sekarang dapat terbagi menjadi tiga yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal dapat berupa pendidikan yang mengenal jenjang pendidikan, pendidikan nonformal contohnya latihan kerja dan kursus-kursus sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung seumur hidup.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia khususnya pada pendidikan formal, mempunyai jenjang atau tingkatan tertentu. Adapun pengertian dari tingkatan atau jenjang pendidikan yaitu suatu tahapan dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.¹⁷ Tingkat pendidikan di sini adalah jenjang pendidikan formal.

Jenjang atau tingkat pendidikan formal menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah : (1) pendidikan dasar, (2) pendidikan menengah dan (3) pendidikan tinggi.¹⁸

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat

¹⁷ *Undang-undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003), pasal 1 ayat (8), hlm. 6.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

mendasar yang diperlukan untuk hidup di masyarakat serta menyiapkan anak didik yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini diselenggarakan dalam jangka waktu sembilan tahun. Enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan alam, sosial, serta lingkungan budaya. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan pelajar untuk mengikuti pendidikan tinggi, pendidikan menengah kejuruan berfungsi untuk menyiapkan pelajar memasuki lapangan kerja sesuai dengan pendidikan kejuruan yang diikutinya atau mengikuti pendidikan keprofesian pada tingkat pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Sesuai dengan tingkatan yang ada pada pendidikan formal maka kepribadian yang terbentuk juga akan berubah-ubah dan berbeda-beda. Kepribadian adalah seluruh tingkah laku seseorang mulai dari cara berfikir,

bersikap dan bertindak bahkan termasuk pula pandangan hidup yang mendasarinya. Sikap atau kepribadian yang terbentuk pada lulusan tiap jenjang formal sebagai berikut :

1. Lulusan SD
Sifat kepribadian yang dimiliki adalah statis dan cenderung dogmatis.
2. Lulusan SMTP
Sifat kepribadian yang dimiliki adalah sedikit punya inisiatif, kreatif tapi cenderung skeptis dan birokratis.
3. Lulusan SMTA
Sifat kepribadian yang dimiliki adalah kritis, kreatif, rasional, memiliki inisiatif tetapi cenderung otonom.
4. Lulusan Perguruan Tinggi
Sifat kepribadian yang dimiliki adalah terbuka terhadap kritik, dinamis, kosmopolit, tidak fanatis dan cenderung bersifat demokratis.¹⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan jenjang pendidikan akan memberikan hasil lulusan yang berbeda di dalam sikap dan kepribadiannya. Seseorang yang berpendidikan tinggi tentunya akan mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, juga memberi kesadaran untuk memberikan apa yang didapat kepada orang lain, bersikap terbuka atau lebih mudah memahami permasalahan yang dihadapi dan akhirnya dapat segera menciptakan alternatif pemecahannya. Ada kecenderungan yang kuat bahwa pendidikan yang tidak rendah

¹⁹ Marini, *Hubungan antara Jenjang Pendidikan dengan Keberhasilan Usaha Permak Jeans di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi FT UNY, 2003), hlm. 13.

merupakan faktor penunjang bagi peningkatan derajat kepatuhan/kesadaran hukum.²⁰

2. Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah tidak lepas dari sadar (kesadaran) kehendak dan sadar (kesadaran) hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat (tahu) akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lain.²¹

Dari pengertian tersebut maka sadar (kesadaran) merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, pula merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka sadar dan kesadaran mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan dan norma dalam masyarakat.²²

Sebagai konsekuensi logis kesadaran ini tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral dan etik dan lingkungan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 255.

²¹ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swara, 1980), hlm. 14.

²² *Ibid*, hlm. 14-15.

Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan kata lain, pengembangan kesadaran hukum untuk menegakkan hukum diharapkan dapat menghasilkan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Karena tujuan hukum untuk mewujudkan kedamaian dalam pergaulan sosial hanya akan terealisasi bila ada keserasian antara nilai ketertiban yang bersifat lahiriah/eksternal dengan ketentraman yang bersifat batiniah/internal.

Itulah sebabnya upaya pengembangan kesadaran hukum masyarakat kita tidak mudah, sebab tidak saja hal itu dipengaruhi oleh faktor eksternal tapi juga ditentukan oleh faktor internal, yaitu mental spritual yang sehat. Pengembangan mental yang sehat ini amat tergantung pada pendidikan informal yang secara sungguh-sungguh pernah dijalani.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat tersebut.²³ Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca, dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan.

Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan masyarakat mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan

²³ Asbar, S.H., dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Jakarta: Depag, RI, 2002), hlm. 203.

untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif.

Savigny mengatakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat (*volksgeist*).²⁴ Jadi kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Kemudian dari kesadaran hukum itu diaplikasikan dengan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku, baik itu hukum positif maupun kaidah hukum Islam yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip ruh Al-quran.

Hukum Islam (*fiqh*, *syari'ah*) tidak saja berfungsi sebagai hukum normatif, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai sekular. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh

²⁴ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, hlm. 1.

sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.

Dalam perkembangannya, ilmu fiqh selalu menggunakan metode-metode yang rasa keadilan masyarakat. Di antara metode-metode itu ialah *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *'urf*. *Maslahah mursalah* berarti menetapkan hukum dalam masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash (al-qur'an dan hadits) dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup masyarakat, yang intinya adalah menghindari kerugian dan memperoleh manfaat. *Istihsan* adalah menetapkan hukum bagi keuntungan bersama dalam pergaulan masyarakat. *Istishab* berarti mengamalkan suatu ketentuan hukum dalam masyarakat sampai ada ketentuan lain yang mengubahnya. Sedang *'urf* yang secara harfiah berarti adat kebiasaan merupakan metode fiqh yang menghendaki suatu adat kebiasaan masyarakat dipertahankan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada *'urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki

norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam.²⁵

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan mengantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu secara jelas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁶

Apabila kesadaran hukum telah melekat pada diri masing-masing masyarakat maka terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum dengan mengaplikasikan (menerapkan) kaidah hukum yang telah ditentukan.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan ketaatan atau kepatuhan kepada hukum.²⁷

Berdasarkan indikator itu dapat diukur sejauhmana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan yang meliputi :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi-isi peraturan hukum.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.

²⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 5.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ OK Chairuddin, , *Sosiologi Hukum*, hlm. 101.

d. Pola-pola perilaku hukum.²⁸

Kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses berlakunya hukum secara menyeluruh. Satu sisi lain menyatakan bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkret, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut di dasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan masyarakat. Kemudian kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin tidak. Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.²⁹

Dalam bermuamalah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dan etika yang ada, menurut Ahmad Azhar Basyir, fikih muamalah mempunyai prinsip yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalat itu dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.

²⁸ *Ibid*, hlm. 102.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 209.

- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁰

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang harus berdasarkan norma-norma hukum Islam. Namun tidak menutup kemungkinan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu adalah boleh dan dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syari'at, ini sesuai dengan yang dikatakan al-Buti :

Di mana ditemukan (dicapai) kemaslahatan, maka di situlah syari'at (hukum) Allah. Oleh karena itu, tidak patut kita berbuat kaku pada nash-nash (teks Qur'an dan hadist) dan fatwa-fatwa terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri terhadap perkembangan zaman dan kemaslahatan kekinian.³¹

Hal ini juga sesuai dengan maksud kaidah :

العادة محكمة³²

Selain itu kebolehan jual beli juga telah dipertegas dalam ketentuan nash, yaitu:

واحل الله البيع وحرم الربا³³

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, hlm. 10.

³¹ Mu'alim. A, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 36.

³² Jalāluddin 'Abdurrahmān ibn Abū Bakr as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut : Dār al-Fikr, tt), hlm.63.

³³ Al-Baqarah (2): 275.

Ketentuan yang ada ini hendaknya menjadi tolak ukur dan landasan teori dalam perdagangan yang berlaku di pasar-pasar manapun, demikian juga di pasar Cipulir.

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis di atas maka pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

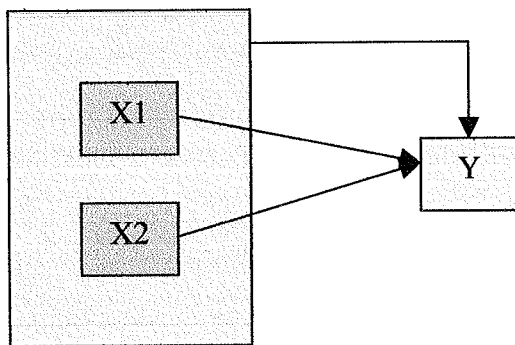
1. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli.
2. Terdapat hubungan yang positif antara pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli.
3. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli secara bersamaan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli.

G. Variabel-Variabel Pokok

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan (X1) dan Pemahaman Agama tentang Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli (X2), sedangkan variabel terikat adalah Kesadaran Hukum Pedagang Menerapkan Hukum Islam dalam Jual Beli (Y).

Hubungan antara variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada model penelitian di bawah ini:

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian



Keterangan: Y = Kesadaran Hukum Pedagang Menerapkan Hukum Islam dalam Jual Beli

X1 = Tingkat pendidikan

X2 = Pemahaman Agama tentang Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *ex post facto*, dalam penelitian ini tidak dilakukan kontrol terhadap variabel dan peneliti juga tidak melakukan

pengaturan atau manipulasi terhadap variabel. Kerlinger (1973) mendefinisikan *ex post facto* sebagai pencarian empirik yang sistematis dimana ilmuwan tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas karena peristiwanya terjadi atau karena menurut sifatnya tidak dapat dimanipulasi.³⁴

Penelitian ini hanya mengungkap fakta berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden sebelum penelitian dilakukan, tanpa membuat perlakuan atau manipulasi pada variabel penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati peneliti dan populasi adalah kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi peneliti.³⁵ Adapun populasi penelitian ini adalah para pedagang yang terdapat di pasar Cipulir. Responden pada penelitian ini dibatasi pada para pedagang yang beragama Islam, dengan asumsi mereka memiliki pengetahuan tentang kaidah dan norma agama Islam itu sendiri, terlepas dari sejauhmana mereka mengetahui, memahami, menghayati dan menerapkan dalam praktek perdagangan mereka.

Populasi pedagang di pasar Cipulir berjumlah sekitar 2000 orang, yang terdiri dari pedagang tetap dan setengahnya pedagang musiman.³⁶ Berdasarkan perkiraan, persentase yang beragama Islam yaitu sekitar 85

³⁴ Consuelo G. Sevilla...[et.al], *Pengantar Metode Penelitian*, penerjemah Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 124.

³⁵ *Ibid*, hlm. 160.

³⁶ *Profil Usaha Kecil di Indonesia* (Jakarta: Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994), hlm. 49.

persen maka jumlah pedagang yang beragama Islam ada sekitar 1700 orang. Pada penelitian ini, populasi yang diteliti hanya pedagang tetap dengan jumlah lebih kurang 850 orang. Asumsi ini diambil dengan pertimbangan bahwa hanya mereka yang cukup representatif dalam mengungkapkan persoalan yang ada di pasar Cipulir dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam dalam praktek perdagangan mereka.

Mengingat populasi cukup banyak dengan jumlah sekitar 850 orang, maka dalam teknik pengambilan sampel penyusun tidak akan mengambil semua sebagaimana sampel. Gay (1976) menawarkan beberapa ukuran minimum yang dapat diterima berdasarkan tipe penelitian, sebagai berikut:

- a. *Penelitian deskriptif* — 10 persen dari populasi. Untuk populasi yang sangat kecil diperlukan minimal 20 persen.
- b. *Penelitian korelasi* — 30 subjek.
- c. *Penelitian ex post facto atau penelitian causal komparatif* — 15 subjek per kelompok.
- d. *Penelitian eksperimen* — 15 subjek per kelompok. Beberapa ahli percaya bahwa 30 subjek per kelompok dapat dipertimbangkan sebagai ukuran minimum.³⁷

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu *ex post facto* maka sampel yang diambil adalah 15 subjek per kelompok, hal ini sesuai dengan karakteristik responden yang berstrata (SD, SMP, SMU dan Sarjana). Untuk

³⁷ Consuelo G. Sevilla...[et.al], *Pengantar Metode Penelitian*, penerjemah Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 163.

efektifnya pengambilan sampel berstrata ini, anggota dalam tiap strata diambil secara acak (*stratified random sampling*).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Angket

Adalah daftar pertanyaan untuk memperoleh jawaban dari responden (orang yang menjawab), daftar pertanyaan ini kemudian diisi dan dijawab sendiri oleh kalangan pedagang.³⁸ Metode yang dipergunakan adalah berstruktur dan terbuka yaitu responden tinggal memilih jawaban yang disediakan dengan menjawab secara bebas. Data yang ingin diperoleh dari penggunaan angket adalah identitas pribadi para pedagang, data tentang pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan ketentuan hukum Islam dalam jual beli.

b. Observasi

Obsevasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki. Dalam observasi ini penyusun melakukan keterlibatan pasif, karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku. Keterlibatan dengan pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelakunya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mendapatkan gambaran yang selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang ada hubungannya dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

³⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 16.

c. Dokumentasi

Adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain, metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.³⁹

a. Tingkat Pendidikan

Instrumen ini diambil dengan melihat tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh pedagang.

b. Pemahaman Agama tentang Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli

Instrumen ini digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat pemahaman, pengetahuan pedagang terhadap ketentuan hukum Islam dalam jual beli. Penyusunan butir-butir pertanyaan di dasarkan pada indikator-indikator yaitu: pengetahuan dan pemahaman. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat dibuat kisi-kisi dan penjabaran instrumen penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1.1.berikut:

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 84.

Tabel 1.1 Kisi-kisi Instrumen Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli

No	Indikator	Sub Indikator	No Butir	Jml
1	Pengetahuan	Kedalaman pengetahuan	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15	15
		Cara mendapatkan pengetahuan	16,17,18,19,20	5
2	Pemahaman	Kemanfaatan pengetahuan	21,22,23,24,25	5
		Total Butir		25

c. Kesadaran Hukum Pedagang Menerapkan Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli

Instrumen ini digunakan untuk mengukur kesadaran pedagang dalam menerapkan aturan atau ketentuan hukum Islam tentang jual beli dalam praktek perdagangan mereka. Penyusunan butir-butir pertanyaan di dasarkan pada indikator-indikator yaitu: sikap dan ketaatan (pola perilaku). Berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat dibuat kisi-kisi dan penjabaran instrumen penelitian yang dapat dilihat pada tabel. 1.2. berikut:

Tabel 2.1. Kisi-kisi Instrumen Kesadaran terhadap Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli

No	Indikator	No Butir	Jml
1	Sikap	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,	16
2	Pola perilaku	17,18,19,20,21,22,23,24,25	9
		Total Butir	25

Dalam penyusunan angket ini digunakan skala pengukuran model Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), KS

(kurang setuju) dan TS (tidak setuju). Jawaban SS untuk pertanyaan/ Pernyataan yang bersifat positif diberi skor 4, pilihan S diberi skor 3, pilihan KS diberi skor 2 dan pilihan TS diberi skor 1. Untuk pertanyaan/ pernyataan negatif pemberian skor sebaliknya.

6. Uji Coba Instrumen

Setelah instrumen disusun maka langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. Instrumen yang telah dianggap valid dan reliabel selanjutnya diuji cobakan di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan uji coba terpakai, artinya pelaksanaan uji coba dilakukan bersamaan dengan penelitian sesungguhnya.

a. Validitas Instrumen

Masalah validitas berhubungan dengan sejauhmana suatu alat mampu mengukur apa yang dianggap orang seharusnya diukur oleh alat tersebut.⁴⁰

Komisi gabungan *the American Psychologi Association*, AERA dan *the National Council on Measurement in Education* membedakan tiga jenis validitas: 1) Validitas isi (*content validity*) yaitu menunjuk pada sejauhmana instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki, 2) Validitas yang dikaitkan dengan kriteria (*criterion-related validity*) yaitu pada hubungan antara skor suatu instrumen pengukuran dengan suatu variabel (kriteria) luar yang mandiri dan dipercaya dapat mengukur langsung tingkah laku atau ciri-ciri yang diselidiki, 3) Validitas bangunan-pengertian (*construct validity*) yaitu menunjuk pada seberapa jauh suatu

⁴⁰ Donald Ary..[et.al], *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, penterjemah Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 281.

tes mengukur suatu sifat atau bangunan-pengertian (*construct*), validitas ini adalah jenis validitas yang penting bagi tes-tes yang digunakan untuk menilai kemampuan dan sifat kejiwaan seseorang.⁴¹

Berdasarkan pendapat di atas, maka uji validitasi instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas isi (*content validity*) dan uji validitas konstruksi (*construct validity*).

Menurut Suharsimi Arikunto, untuk menguji validitas setiap butir maka skor-skor yang ada pada butir dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai nilai (X) dan skor total dipandang sebagai nilai (Y). Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir dapat diketahui dengan pasti butir yang memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya.⁴²

Adapun untuk mengkorelasikan skor tiap-tiap butir dengan skor totalnya digunakan korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2\}\{N(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{XY} : Koefisiensi korelasi antara skor butir dan skor total

ΣXY : Jumlah perkalian skor butir dan skor total

X : Skor butir

⁴¹ *Ibid*, hlm. 289.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.141.

- Y : Skor total
- N : Jumlah sampel
- ΣX : Jumlah skor butir
- ΣY : Jumlah skor total
- $(\Sigma X)^2$: Kuadrat jumlah skor butir
- $(\Sigma Y)^2$: Kuadrat jumlah skor total

Butir instrumen kemudian dianalisa dengan menggunakan komputer Seri Program Statistik (SPS) dari Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih. Kriteria uji validitas butir dikatakan valid apabila harga koefisien korelasi (r_{XY}) lebih besar atau sama dengan harga korelasi (r) tabel, pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$

Dalam taraf signifikansi dan $N = 30$ diperoleh r tabel sebesar 0,361 sebagai patokan. Dengan demikian butir yang mempunyai harga r hitung $> 0,361$ dinyatakan valid dan butir yang mempunyai r hitung $< 0,361$ dinyatakan gugur.

b. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas mengacu pada sejauhmana suatu alat pengukur secara *ajeg* (konsisten) mengukur apa yang diukurnya,⁴³ sehingga dapat diketahui apakah instrumen tersebut bisa diandalkan sebagai alat pengumpul data atau tidak. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama.

⁴³ Donald Arya.[et.al], *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, penterjemah Arief Furchan, hlm. 281.

Untuk menguji reliabilitas dari instrumen penelitian ini yang berupa angket, maka digunakan rumus alpha karena skor instrumen mempunyai rentang dari 1 – 4. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa untuk mengetahui reliabilitas alat pengumpul data yang berupa angket dengan skala bertingkat (*rating scale*), maka digunakan rumus alpha.⁴⁴ Sedangkan Fernandes sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Rai Julaiwan, berpendapat bahwa apabila instrumen menggunakan skala Likert, indeks keterandalannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus alpha.⁴⁵ Adapun rumus alpha tersebut adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \alpha b^2}{\alpha t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} : Reliabilitas Instrumen

k : Banyaknya butir soal

$\sum \alpha b^2$: Jumlah varian butir

αt^2 : Jumlah varian total.

Sebagai tolak ukur tinggi rendahnya koefisien reliabilitas digunakan interpretasi yang dikemukakan oleh Sugiyono berikut⁴⁶ :

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 164.

⁴⁵ I Dewa Gede Rai Julaiwan, *Studi Korelasi antara Pengetahuan Kewiraswastaan, Motivasi Berwiraswasta dan Kemampuan Kejuruan dengan Minat Berwiraswasta Siswa Kelas III Rumpun Teknologi Pengerjaan Logam STMN di Bali Tahun 1991/1992*, (Skripsi FPTK IKIP Yogyakarta 1992), hlm. 77.

⁴⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta 1997), hlm. 200.

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Korelasi

Rentang Nilai	Interprestasi
0, 00 – 0, 20	Sangat rendah
0, 20 – 0, 40	Rendah
0, 40 – 0, 60	Cukup
0, 60 – 0, 80	Tinggi
0, 80 – 1, 00	Sangat tinggi

7. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan teori statistik sebagai alatnya dan pendekatan sosiologis untuk menelaah efektivitas hukum Islam di dalam masyarakat.

8. Teknik Analisis Data

Jumlah ubahan dalam penelitian ini ada tiga yaitu dua ubahan bebas dan satu ubahan terikat. Ubanan bebas tersebut adalah Tingkat Pendidikan (X1) dan Pemahaman Agama tentang Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli (X2), sedangkan ubahan terikatnya adalah Kesadaran Hukum Pedagang Menerapkan Hukum Islam dalam Praktek Jual Beli (Y).

Data dari ubahan yang berskala interval didiskripsikan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan menggunakan distribusi frekwensi, histogram, rerata (Mean), Simpangan Baku (SB), Median (Me) dan Modus (Mo).

Untuk mengidentifikasi kecenderungan variabel penelitian digunakan harga rerata ideal (M_i) dari seluruh responden untuk setiap ubahan sebagai kriteria bandingan. Dari harga rerata ideal tersebut dapat dikategorikan kecenderungan menjadi empat kategori norma yaitu:

$M_i + 1,5 \text{ SD}_i$ ke atas : Tinggi

M_i sampai $M_i + 1,5 \text{ SD}_i$: Cukup tinggi

Mi – 1,5 SDi sampai Mi : Kurang

Di bawah Mi – 1,5 SDi : Rendah

Dimana Mi = skor rerata ideal, dan SDi = simpangan baku ideal.

Kategori tersebut disusun berdasarkan kurve normal dengan menggunakan skor ideal dari instrumen masing-masing ubahan, dengan formulasi sebagai berikut :

$$SDi = 1/6 (Nit-Nir)$$

$$Mi = 1/2 (Nit-Nir).^{47}$$

a. Pengujian Persyaratan Analisis

Sehubungan dengan pengujian korelasi, Sutrisno Hadi mengemukakan adanya persyaratan yang harus dipenuhi agar kesimpulan yang ditarik tidak menyimpang dari kebenaran yang seharusnya diambil. Adapun persyaratan tersebut adalah:⁴⁸

- 1) Sampel penelitian harus diambil secara acak.
- 2) Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) merupakan hubungan yang linier.
- 3) Distribusi data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) adalah normal atau mendekati normal.

Untuk maksud di atas, maka perlu diadakan uji persyaratan analisis korelasi.

⁴⁷ Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 47-48.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Statistik Jilid II*, (Yogyakarta: Psikologi UGM), hlm. 303.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam penelitian ini datanya berdistribusi normal atau tidak sebagai persyaratan pengujian hipotesis, untuk menguji normalitas data dari masing-masing ubahan digunakan uji Chi Kuadrat. Rumus yang digunakan untuk menghitung normalitas data

adalah :

$$X^2 = \sum_j \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

Keterangan : X^2 : Koofisien chi kuadrat

f_o : Frekwensi observasi

f_h : Frekwensi harapan

Kriteria pengujian normalitas data dari setiap variabel ubahan yaitu jika X^2 hitung $< X^2$ tabel taraf signifikansi 5%, maka data variabel adalah normal, sebaliknya jika X^2 hitung $> X^2$ tabel taraf signifikansi 5% data variabelnya adalah normal.

2) Uji Linieritas

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah hubungan variabel bebas dan variabel terikat berbentuk linier atau dengan variabel terikat kriterium. Uji linieritas dilakukan dengan uji statistik F.⁴⁹

Rumus yang dipergunakan untuk uji linieritas adalah:

⁴⁹ Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 17.

$$F = \frac{Rjk(TC)}{Rjk(E)}$$

Keterangan :

Rjk (TC) : Rata-rata jumlah kuadrat cocok

Rjk (E) : Rata-rata jumlah kuadrat kekeliruan

Kriteria pengujian linieritas adalah jika F hitung < F tabel taraf uji signifikansi 5%, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat berbentuk linier.

3) Uji Multikolinier

Sebagai syarat analisis regresi linier ganda digunakan uji multikolinieritas. Uji informasi dengan menyelidiki besarnya harga interkorelasi antar prediktor dengan analisis korelasi *product moment*. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada pendapat Damodar Gujarati yang dikutip Agung Setiawan, menyatakan bahwa jika harga interkorelasi antar variabel bebas lebih besar atau sama dengan 0,80 berarti terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

b. Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis korelasi *product moment* dan teknik analisis regresi ganda dengan dua prediktor.

Teknik analisis *product moment* digunakan untuk menguji hipotesis (1) dan (2) yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel

bebas dengan variabel terikat, secara umum rumusnya adalah sebagai

berikut :
$$r_{XY} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{XY} : Koefisien korelasi variabel X dan variabel Y

N : Banyaknya subyek

X : Nilai variabel X

Y : Nilai variabel Y⁵⁰

Kemudian untuk menguji signifikansi r_{XY} , dikonsultasikan dengan harga r tabel. Apabila nilai r yang diperoleh dari perhitungan sama atau lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan korelasi antara kedua ubahan tersebut signifikan, tetapi jika nilai r_{XY} lebih kecil dari r tabel maka korelasi tersebut tidak signifikan.

Teknik analisis regresi ganda dengan dua prediktor digunakan untuk menguji hipotesis (3) yaitu digunakan peranan kedua ubahan bebas terhadap ubahan terikatnya secara bersama-sama. Rumusnya adalah

sebagai berikut :
$$R_{x_{1,2}Y} = \sqrt{\frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}}$$

Keterangan :

$R_{x_{1,2}Y}$: Koefisien korelasi X_1 , X_2 , dan Y

b_1 : Koefisien prediktor X_1

b_2 : Koefisien prediktor X_2

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi. Research Jilid III*, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1995), hlm. 25.

$\Sigma X_1 Y$: Jumlah kovarian antara X_1 dan Y

$\Sigma X_2 Y$: Jumlah kovarian antara X_2 dan Y

ΣY^2 : Jumlah varian kriterium⁵¹

Adapun persamaan garis regresi dua prediktor adalah sebagai berikut :

$$Y = b_1 X_1 + b_2 X_2 + K$$

Dimana :

Y : Ubahan terikat

X : Ubahan bebas

b : Koefisien prediktor

K : Bilangan konstanta⁵²

Untuk mengetahui signifikansi dari garis regresi digunakan uji F

yaitu :

$$F_{reg} = \frac{R^2(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Dimana :

F_{reg} : Harga F garis regresi

N : Cacah kasus

m : Cacah prediktor

R : Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm.33

⁵³ *Ibid*, hlm. 26.

Kriteria yang digunakan untuk analisis regresi ini adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel maka sumbangan kedua ubahan prediktor terhadap kriterium adalah signifikan, demikian juga sebaliknya.

Selanjutnya untuk mengetahui sumbangan relatif prediktor terhadap kriterium terlebih dahulu harus dihitung efektifitas garis regresinya dengan

rumus⁵⁴:
$$R^2 = \frac{Jk.reg}{Jk.tot} \times 100\%$$

Sumbangan Efektif (SE) ubahan bebas :

$$SE\% = R^2 \times SR\%$$

Dimana :

SE : Nilai sumbangan efektif

SR : Nilai sumbangan relatif

R^2 : Koefisien determinan.⁵⁵

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua akan dipaparkan pengertian dan teori dasar hukum kebolehan jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli,

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 21.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 46.

ketentuan-ketentuan akad yang meliputi siqat akad, pihak-pihak yang melakukan akad, syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah etika dan moral perdagangan dalam Islam yang meliputi moral perdagangan, aturan perdagangan yang terdiri dari mempromosikan barang, cara memperoleh keuntungan dalam dagang, serta cara penentuan harga.

Untuk memperoleh gambaran umum lebih rinci dari data penelitian, maka pada bab tiga penyusun akan mendiskripsikan kondisi geografis, sarana dan prasarana, struktur organisasi, serta pelaksanaan perdagangan.

Pada bab empat, untuk memperoleh hasil penelitian penyusun akan menganalisa jual beli grosir dalam perspektif hukum Islam dan menganalisa data-data yang telah terkumpul, yang meliputi : aspek pengetahuan dan pemahaman, aspek kesadaran pedagang dalam ketentuan hukum Islam dalam jual beli.

Akhirnya pada bab lima akan diperoleh kesimpulan serta saran saran yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran para pedagang pasar Cipulir menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli cukup tinggi (distribusi kecenderungan 78,3%).
2. Tidak terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli ($r_{x1y} = 0,151$ dan $p = 0,248$). Patokan signifikan jika $p < 0,05$ terdapat korelasi yang signifikan. Artinya pendidikan bukan faktor penentu kesadaran pedagang dalam menerapkan ketentuan hukum Islam dalam jual beli. Selama ini pendidikan formal memang tidak memberikan pemahaman agama yang komprehensif terhadap ketentuan hukum Islam dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia, terutama kehidupan perekonomian.
3. Terdapat hubungan yang positif antara pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli dengan kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli ($r_{x2y} = 0,292$ dan $p = 0,022$). Patokan signifikan jika $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para pedagang tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli banyak dipengaruhi oleh keuntungan yang ditawarkan hukum Islam tentang jual beli. Contoh hukum Islam yang saat ini amat populer

adalah ketentuan bank syariah yang telah digunakan bahkan oleh para kaum non-muslim.

4. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan pemahaman agama tentang ketentuan hukum Islam secara bersama-sama terhadap kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli ($R_{yx1.2.3} = 0,316$ dan $p = 0,049$). Persamaan garis regresi $Y = 37,83 + 0,707 X_1 + 0,316 X_2$. Dari hasil korelasi ganda tersebut ditemukan koefisien determinan (R^2) sebesar 0,0998, hal ini memberikan pengertian bahwa 9,98% dari variabel kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam dalam praktek jual beli dijelaskan oleh kombinasi variabel tingkat pendidikan (1,845%) dan variabel pemahaman agama terhadap ketentuan hukum Islam dalam jual beli (8,137%). Sedangkan sisanya 90% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan pemahaman kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran berikut :

1. Dunia pendidikan yang bersifat formal baik tingkat dasar, menengah, tingkat atas hingga perguruan tinggi hendaknya lebih menekankan sesuai kapasitasnya pendidikan dan pengetahuan akan aturan-aturan hukum ekonomi Islam secara lebih komprehensif. Sehingga para peserta didik yang telah lulus dari pendidikannya yang memilih lapangan wiraswasta

atau bisnis perdagangan sebagai usaha mereka, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk terjun ke dunia kerja/usaha

2. Bagi dinas pasar, dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya hendaknya lebih sering mengadakan *event-event* dan menciptakan momen yang berkaitan dengan pemberian informasi dan penyuluhan kepada pedagang tentang hukum ekonomi Islam, sehingga pengetahuan dan kesadaran pedagang akan hukum Islam bisa lebih baik. Dan akhirnya dapat tercipta suasana praktek perdagangan yang baik dan jujur.
3. Kepada para usahawan Muslim yang saat ini belum menerapkan secara sungguh-sungguh etika Islam dalam kegiatan bisnisnya, hendaknya sebelum terlambat cobalah untuk mempelajari dan memahami etika Islam dalam bisnis dan setelah itu cobalah terapkan dalam kegiatan bisnis anda, niscaya kalau kita sungguh-sungguh, ikhlas dalam bisnis dalam rangka ibadah dan mencari keridlaan Allah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan antara lain

1. Objek yang diteliti dalam penelitian ini masih terbatas pada persepsi pedagang (responden) terhadap penerapan hukum Islam dalam jual beli, belum pada realitas aktivitas pedagang. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih ditekankan pada sisi realitas aktivitas pedagang dalam kesadaran menerapkan hukum Islam dalam jual beli.

2. Dalam penelitian ini, faktor pengaruh umur responden terhadap kesadaran menerapkan hukum Islam belum menjadi subjek yang diteliti. Untuk itu bagi peneliti yang berminat mengkaji masalah kesadaran agar mengkaji lebih dalam faktor pengaruh usia terhadap kesadaran pedagang menerapkan ketentuan hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

B. Fiqh Ushul Fiqh

'Abdurrahmān, Jalāluddīn ibn Abū Bakr as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet I, Jakarta : Tiara Wacana, 1994.

Ash-Siddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, alih bahasa Abd. Hamid Zahwan, cet.2, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, edisi revisi, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Djamali R. Abdul, *Hukum Islam I, Asas-asas Hukum Islam II*, Bandung : Mandar Maju, 1992.

Mukhlis, H. Usman *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Pasaribu, Chairuman. dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru, 1989.

Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Kitab al-'Arabi, 1971.

-----, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin. dkk, Bandung : Al-Maarif, 1988.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet I, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Taqiuddin, al Imam Abu Bakar Muhammad Al Husaini Al Husni, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar Al Fikr, tt.

Yudani, A. Mu'alim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1289.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990.

C. Hadist/Ulumul Hadist

Al-Asqalāni, Ibnu Hajar, *Bulūgh al-Marām*, Semarang : Usaha Keluarga, t.t

As-San'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulu as Salām*, Beirut : Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, tt.

Muslim, Imam, *al-Jami' as-Şhahih*, Dār al-Fikr: Beirut, tt.

D. Kelompok Kamus dan Buku-Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Ary Donald, alih bahasa Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.

Chairuddin, O.K, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta : Depag RI, 2002.

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, *Profil Usaha Kecil di Indonesia*, Jakarta, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional RI, *Undang-undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Depdiknas RI, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Emirzon, Joni, *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : PT. Prenhalindo, 2000.

- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research III*, Yogyakarta : Psikologi UGM, 1995.
- , *Statistik Jilid II*, Yogyakarta : Psikologi UGM, 1989.
- Hartatik, Sri, *Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Julaiwan, I Dewa Gede Rai, *Studi Korelasi antara Pengeetahuan Kewiraswastaan, Motivasi Wiraswasta dan Kemampuan Kejuruan dengan Minat Berwiraswasta Kelas III Rumpun Teknologi Pengerjaan Logam STMN di Bali Tahun 1991/1992*, Yogyakarta : FPTK IKIP, 1992.
- Kafh, Monzer : alih bahasa Machmud Husein, *Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Komaruddin, *Uang di Negara Berkembang*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1976.
- Marini, *Hubungan antara Jenjang Pendidikan dengan Keberhasilan Usaha Permak Jeans di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : FT. UNY, 2003.
- Munawwir W. Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta : PP. Al-Munawwir, tt.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan, Makna Ekonomi Islam*, Jakarta : CV. Mas Agung, 1988.
- Pratikno Hartono Suryo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta : Mustika Wikasa, 1994.
- Salim, Peter dan Salim, Yuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1999.
- Salman, Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni, 1989.
- Sevilla G. Consuello alih bahasa Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1982.

-----, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV.Rajawali, 1982.

Sudjana, *Metode Statistik*, Bandung : Tarsito, 1988.

-----, *Metode Statistik*, Bandung : Tarsito, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfa Beta, 1999.

-----, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : Alfa Beta, 1997.

Tirtarahardja, Umar, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Widjaja, AW, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta : CV. Era Swara, 1980.

Zaky Al Kaaf, Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2002.